TPP dan Tantangan bagi Indonesia

**Jakarta, […] November 2015**. Pernyataan Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu lalu di Washington, DC bahwa Indonesia berniat bergabung ke dalam pakta Kemitraan Trans-Pasifik atau *Trans Pacific Partnership* (TPP) telah mengundang komentar dari berbagai pihak, baik yang mendukung maupun dan terutama yang keberatan. Pernyataan itu perlu disikapi dengan bijak sebelum Pemerintah mengambil keputusan final apakah akan bergabung ke dalam TPP, dan keputusan itu tentunya harus didasarkan pada sebesar-besarnya kepentingan ekonomi nasional Indonesia sendiri.

**TPP dan Matarantai Pasokan Global**

Perjanjian TPP dirundingkan dan disepakati di tengah menguatnya phenomena matarantai pasokan global atau *global value chain* (GVC). Dengan menghapuskan hambatan di sektor-sektor penting seperti manufaktur, pertanian, jasa, investasi dan tenaga kerja, serta membangun disiplin bersama dalam penyusunan dan penerapan peraturan perundangan, standar, persaingan usaha dan lain-lain, para anggota TPP mencoba memanfaatkan phenomena GVC untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masing-masing negaranya. Dengan GVC, misalnya, suatu produk tidak lagi diproduksi sepenuhnya di satu Negara, tetapi memanfaatkan input dari sumber-sumber yang termurah untuk diolah ke tahapan berikut di tempat yang paling kompetitif sebelum produk akhirnya beredar di pasar dalam negeri dan pasar ekspor.

Phenomena GVC seperti itu dapat berjalan mulus apabila Negara-negara yang terlibat di dalamnya saling menurunkan hambatan-hambatan impor, investasi, dan jasa, ketentuan kandungan lokal, kemudahan arus tenaga professional dan pembatasan lainnya seraya berusaha meningkatkan daya saing ekonominya agar dapat menjadi “magnet” untuk dijadikan basis produksi dari GVC di sektor-sektor tertentu. Kita tentu tidak dapat menutup mata bahwa dalam proses perudingan TPP, perusahaan-perusahaan besar termasuk *multinational corporations* atau MNCs melakukan kegiatan *lobbying* kepada pemerintah agar kepentingan komersialnya dapat diakomodir dalam perjanjian yang akan disepakati. Karena tujuan dari perjanjian kemitraan seperti TPP ini adalah untuk mendorong kegiatan ekonomi, rasanya wajar bila pemerintah mencoba mengakomodir berbagai masukan termasuk dari MNCs. Pemerintah dengan tim runding yang kuat akan lebih mampu mengakomodir aspirasi dunia usahanya dibanding pemerintah yang tidak didukung oleh tim runding yang kuat.

**Siapkah Indonesia?**

Berdasarkan draft teks perjanjian TPP yang mulai dapat diakses oleh public sejak 5 November 2015 lalu, dapat dikatakan bahwa inilah perjanjian kemitraan regional yang paling komprehensif dan ambisius untuk mengintegrasikan perekonomian ke-12 anggotanya. Ada kalangan yang menyatakan bahwa Indonesia tidak siap untuk bergabung ke dalam TPP, namun ada pertanyaan mendasar yang perlu kita pertimbangkan: ikut atau tidak ikut TPP atau kerjasama serupa lainnya, siapkah Indonesia untuk bersaing?

Perjanjian seperti TPP dan FTA sebenarnya menawarkan akses pasar ekspor barang, jasa dan investasi bagi Indonesia yang lebih luas dibanding misalnya *platform* yang disediakan oleh sistem WTO yang berlaku umum. Namun sebelum dapat memanfaatkan secara maksimal perjanjian seperti itu, kita perlu memastikan bahwa Indonesia memang dapat bersaing baik di pasar sendiri maupun di pasar Negara anggota. Di sinilah kunci permasalahannya; perekonomian kita terlalu diatur dan diproteksi (*over regulated*) dengan alasan perlindungan terhadap intrusi produk dan investor asing, sementara faktor-faktor kunci daya saing belum terbangun dengan baik dibanding Negara tetangga kita sendiri: kualitas tenaga kerja dan ketersediaan tenaga professional (pendidikan), sektor finansial yang kompetitif dan mudah diakses UKM (sektor keuangan), jaringan distribusi nasional yang secara murah dan cepat menghubungkan tidak saja sentra produksi dengan pasar tetapi juga dengan pusat-pusat industri pengolahan (infrastruktur), serta daya tarik, kepastian dan kemudahan berinvestasi, dan lain-lain.

Jujur saja, kita tidak atau belum terlalu serius menyelesaikan pekerjaan rumah kita sendiri dan ini membuat perekonomian Indonesia cenderung berada di pinggiran peta persaingan ekonomi global—*mediocre economy.* Kita cenderung berburuk-sangka terhadap segala sesuatu yang “bukan kita,” lebih suka menghindari persaingan frontal, enggan memperbaiki diri sendiri, dan sulit belajar dari kesalahan demi kesalahan yang kita buat sendiri.

Perjanjian seperti TPP sebenarnya merupakan sebuah *platform* bersama untuk menciptakan pilihan-pilihan luas bagi investor untuk bergerak bebas mengembangkan bisnisnya secara kompetitif, yang pada gilirannya akan menyumbang pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di mana investor menanamkan modalnya. Intinya adalah daya saing: Negara anggota yang memiliki daya saing tinggi di sektor-sektor tertentu akan mampu memanfaatkan perjanjian TPP. Kita harus meninggalkan keyakinan semu bahwa Indonesia bisa mandiri di semua bidang, menghasilkan sendiri semua barang dan jasa dengan modal sendiri. Di era GVC ini semakin nyata bahwa tidak ada Negara yang dapat sepenuhnya mandiri. Ini menyisakan dua pertanyaan sederhana: maukah kita berubah agar dapat bertarung melawan siapa pun, baik dalam TPP, Masyarakat Ekonomi ASEAN, atau di mana pun? Atau bergabung dengan TPP adalah satu-satunya jalan untuk memaksa diri melakukan perbaikan ke dalam? Kita butuh perubahan *mindset*, kita perlu “revolusi mental” yang sesungguhnya.

-----